

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi dalam sistem ketatanegaraannya. Demokrasi di Indonesia tidak semata-mata meliputi bidang hukum dan sosial, melainkan juga meliputi bidang politik yang kemudian disebut sebagai sistem politik demokrasi. Demokrasi dalam praktek bernegegara dewasa ini, semakin mengalami puncak perkembangannya, dimana demokrasi dalam pengertian yang sederhana, sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Sahya Anggara, dalam pendekatan sistem politik “masyarakat merupakan konsep induk, sebab sistem politik hanya merupakan salah satu struktur yang membangun masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan, dan sebagainya”. Sistem politik pun merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) seputar pendistribusian nilai di tengah masyarakat (Anggara, 2015). Dengan demikian peran aktif keterlibatan masyarakat merupakan cerminan dari sistem politik demokrasi.

Sistem politik demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan perlakuan sama kepada semua anggota kelompok baik kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas dalam hak dan kemampuan masing-masing mereka untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu momentum dari pelaksanaan demokrasi adalah pemilihan kepala daerah yang merupakan kesempatan bagi masyarakat daerah untuk terlibat secara langsung dalam menentukan para pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan. Joko J. Prihantoro (Adhani, 2009) mengatakan bahwa “pemilihan kepala daerah merupakan rekutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Walikota”.

Pengertian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan DPRD. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2005 yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kemudian berlanjut secara berkala, pilkada serentak pernah dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Pada Desember 2020 lalu, Indonesia kembali melaksanakan pilkada serentak untuk keempat kalinya dengan total daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota, dimana salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Indramayu.

Pada pilkada yang diselenggarakan di Kabupaten Indramayu, KPU Indramayu mengatakan terdapat 1.302.788 juta orang yang dipastikan memiliki hak pilih dalam pilkada 2020. KPU menambahkan bahwa jumlah daftar pemilih tetap mengalami penurunan dari pilkada sebelumnya pada tahun 2015. Meskipun begitu, menurut Ketua KPU Kabupaten Indramayu tingkat partisipasi pemilih meningkat dibandingkan dengan pilkada tahun 2015. Berdasarkan data dari KPU Indramayu, tingkat partisipasi politik di Kabupaten Indramayu pada tahun 2010 tingkat partisipasinya sebesar 64,29%, pada tahun 2015 tingkat partisipasi sebesar 58,95% dan pada tahun 2020 tingkat partisipasi sebesar 66,17%.

Meskipun partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Indramayu ini meningkat, tapi indeks partisipasi masih dinilai rendah karena hanya 66,82%. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari Ketua KPU Kabupaten Indramayu pada rekapitulasi data, bahwa jumlah suara sah sebanyak 853.660 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 16.865 suara. Sementara, jumlah pengguna hak pilih (suara sah dan tidak sah) sebanyak 870.525 suara. Merujuk pada data KPU Kabupaten Indramayu, pada

empat pemilu sebelumnya partisipasi masyarakat Indramayu selalu lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat. Partstipasi pemilih di Indramayu rata-rata hanya 68,3%, sementara rata-rata Jawa Barat 72,6%. Hal ini mengindikasikan masyarakat Indramayu termasuk masyarakat di Kecamatan Indramayu kurang antusias terlibat dalam rumusan politik dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat.

Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem *elite vote* ke *popular vote*. Sehingga, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini, namun permasalahan yang sering terjadi adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang pilkada terkadang terjadi konflik yang sulit terhindarkan. Rendahnya partisipasi politik masyarakat disebabkan oleh rendahnya pendidikan politik di kalangan masyarakat, serta rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pilkada maupun pemilu. Kurangnya antusias masyarakat dalam rumusan politik ini juga disebabkan dengan sikap acuh tak acuh masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara.

Minimnya kesadaran politik masyarakat ini harus dibenahi dengan berbagai cara salah satunya dengan melibatkan elit lokal dalam meningkatkan partisipasi politik disamping melaksanakan sosialisasi pendidikan politik pada masyarakat. Elit lokal dirasa dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dikarenakan elit lokal memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Elit lokal dianggap sebagai *role model* oleh masyarakat setempat sehingga mampu membangkitkan semangat partisipasi politik lewat tindakan maupun dorongan yang diberikan oleh elit lokal kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam pilkada 2020 ini, tidak dapat dipungkiri bahwa calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati melakukan pendekatan khusus kepada para elit lokal di kecamatan Indramayu. Para calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya sekedar melakukan silaturahmi dengan elit lokal, tetapi juga untuk meminta doa restu dan dukungan kepada elit lokal agar masyarakat memilih calon pasangan tersebut.

Selama proses kampanye para calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati melibatkan elit lokal. Kampanye bersama elit lokal dinilai efektif dalam merebut

simpati masyarakat. Dalam kampanye bersama elit lokal respon masyarakat berbeda dengan kampanye tanpa elit lokal. Kampanye dengan menggunakan elit lokal sebagai komunikator politik dilaksanakan dengan menggunakan interpersonal dalam penyampaianya. Calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati membina itikad baik dengan para elit lokal dinilai lebih efektif daripada memasang iklan-iklan atau media berbayar lainnya dengan mengharapkan memperoleh suara atau dukungan dari masyarakat.

Kampanye yang dilakukan oleh elit lokal bukan semata-mata untuk membuat masyarakat memilih calon pasangan yang memiliki kedekatan dengannya. Lebih dari itu, tujuan utama elit lokal melakukan kampanye juga untuk mengkampanyekan anti golput, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan baik, serta tujuan utamanya adalah memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sebagaimana menurut Mosca dan Paret bahwa “hal yang paling pokok bagi elit politik adalah melakukan usaha-usaha rasional persuasif untuk mendorong masyarakat supaya lebih aktif dalam partisipasi politik” (Fadli, dkk., 2018, hlm, 308). Masyarakat harus diyakinkan tentang arti penting dan nilai vital politik. Sehingga dengan pemahaman seperti itu, masyarakat turut berpartisipasi dalam aktivitas politik, termasuk masyarakat di daerah.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, elit lokal memberikan edukasi politik dengan melakukan komunikasi politik dan sosialisasi kepada masyarakat. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan arahan dan wawasan politik kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami lebih dalam mengenai pilkada dan para calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak terjadi kebingungan atau bahkan kekeliruan dalam berpikir. Keikutsertaan elit lokal mengajak masyarakat untuk berperan aktif serta berpartisipasi dalam pilkada sangat strategis dalam menyukseskan penyelenggaraan pilkada. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa tokoh desa di dalam masyarakat masih juga memiliki peran yang penting dan juga signifikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berupaya untuk melakukan penelitian di Kecamatan Indramayu dengan judul “Peran elit lokal terhadap

meningkatkan partisipasi politik masyarakat (Studi deskriptif pemilihan Bupati tahun 2020 di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti mengajukan rumusan masalah pokok yaitu “Bagaimana peran elit lokal terhadap meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati tahun 2020 di Kecamatan Indramayu”. Dari rumusan masalah pokok tersebut peneliti jabarkan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana peran elit lokal terhadap meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Bupati tahun 2020 di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu?
- 1.2.2 Apakah peran elit lokal mempengaruhi hak pilih masyarakat terhadap pemilihan Bupati tahun 2020 di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu?
- 1.2.3 Strategi apa yang dilakukan oleh para elit lokal terhadap meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati tahun 2020 di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu?
- 1.2.4 Bagaimana dampak keterlibatan elit lokal terhadap Pemilihan Bupati tahun 2020 di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara aktual dan faktual mengenai sejauh mana keterlibatan para elit lokal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati tahun 2020 di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Mendeskripsikan sejauh mana peran elit lokal terhadap meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati tahun 2020 di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

- 1.3.2 Menganalisis apakah keterlibatan elit lokal mempengaruhi hak pilih masyarakat pada pemilihan Bupati tahun 2020 di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu
- 1.3.3 Mengidentifikasi strategi-strategi yang dilakukan oleh para elit lokal terhadap meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati tahun 2020 di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu
- 1.3.4 Mendeskripsikan dampak keterlibatan elit lokal pada pemilihan Bupati tahun 2020 di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini berupaya akan memperoleh informasi dan data terkait peran elit lokal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati tahun 2020 di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Manfaat penelitian ini bersifat teoretik dan praktis, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoretis

- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritik pada pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik khususnya penguatan pada teori-teori sosial politik yang menjadi dasar analisis penelitian ini.
- 1.4.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritik dalam pengembangan kajian kepemiluan khususnya kajian tentang keterlibatan dan orientasi elite lokal dalam hal pelaksanaan pilkada sehingga terciptanya partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas sehingga pemimpin daerah memiliki legitimasi murni dan komprehensif dari masyarakat.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis terhadap pihak-pihak sebagai berikut:

- 1.4.2.1 Bagi masyarakat: Dapat memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat memahami dan mengkaji permasalahan keterlibatan elit lokal kaitannya dengan partisipasi politik.

1.4.2.2 Bagi elit lokal: Dapat memberikan penyaringan dalam menjalankan perannya sebagai tokoh masyarakat yang dihargai untuk selalu bersikap netral saat kampanye.

1.4.2.3 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan: Dapat dijadikan sebagai referensi keilmuan khususnya dalam bidang pendidikan politik mahasiswa.

1.4.2.4 Bagi peneliti: Dapat memberikan dan menambah wawasan, memperoleh pengalaman langsung, dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berhubungan dengan pendidikan politik.

1.4.3 Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menjadi masukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta *stakeholders* lainnya untuk terus mengoptimalkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada. Dalam hal tersebut, diharapkan KPU dapat memberikan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat secara luas guna memberikan edukasi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

1.4.4 Segi Isu

Dari segi isu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada semua pihak mengenai pentingnya kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi di dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dinatarnya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab I pendahuluan ini, diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka

Kajian pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori, dokumen-dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini, peneliti melakukan analisis hasil temuan data dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai peran elit lokal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, mempengaruhi atau tidaknya peran elit lokal dalam menentukan hak pilih oleh masyarakat, strategi yang dilakukan oleh elit lokal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta dampak dari keterlibatan elit lokal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati tahun 2020 di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, disandingkan dengan teori-teori serta data yang ada.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Pada bab ini, peneliti mencoba menyajikan penafsiran terhadap hasil analisis temuan penelitian serta mengajukan hal-hal penting berupa rekomendasi yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.